

PENEGAKAN HUKUM *BINARY OPTION* DENGAN KEBIJAKAN FORMULASI DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA

ABSTRAK

Praktik *binary option* menjadi viral dikarenakan menawarkan kemudahan dalam mencari keuntungan dan didukung oleh kondisi Covid 19. Tidak hanya itu, munculnya afiliator seperti Indra Kenz dan Doni Salmanan semakin membuat masyarakat tertarik untuk terjerumus dalam investasi bodong ini. Berkaca dari dakwaan yang dilayangkan Jaksa Penuntut Umum, penegakan hukum masih menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik (UU ITE), padahal hukum positif Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (UU PBK). Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui urgensi kebijakan formulasi terhadap praktik binary option dan merumuskan pengaturan yang ideal ke dalam hukum positif di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan bertolak terhadap peraturan perundang-undangan yang ada. Selanjutnya, hasil penelitian yang mengungkapkan bahwa penegakan hukum binary option melalui kebijakan formulasi perlu dilakukan mengingat kondisi kebutuhan hukum pada masyarakat dan penegakan hukum melalui KUHP dan UU ITE dinilai kurang tepat. Dikarenakan *binary option*, meniru kontrak derivatif dan cara kerja dari opsi, serta aset yang ditawarkan merupakan komoditi yang biasanya ditransaksikan pada perdagangan berjangka dengan kata lain praktik ini merupakan penyimpangan terhadap UU PBK. Selain itu, kriminalisasi dimungkinkan dengan menganalisa kriteria atau syarat yang dikemukakan oleh ahli. Kemudian, dimungkinkannya formulasi opsi biner dalam hal perumusan tindak pidananya di dalam hukum positif Indonesia, secara khusus yakni *adressat*, perumusan pelarangan perbuatan, dan sanksi pidananya. Penulis juga merekomendasikan pasal untuk menyatakan pengaturan yang ideal dalam bagian d Pasal 57 UU PBK. Kemudian, penulis tetap mengikuti ketentuan pidana yang telah ada yakni Pasal 72 UU PBK. Sehingga, kebijakan formulasi dimungkinkan jika melihat dari urgensi dan formulasi ketentuan pidana telah dituangkan ke dalam undang-undang khusus. Oleh karena itu, penegakan hukum binary option telah mempunyai ketegasan dasar hukum.

Kata kunci: Penegakan Hukum, *Binary Option*, Kebijakan Formulasi.

**BINARY OPTION LAW ENFORCEMENT WITH FORMULATION
POLICIES IN POSITIVE LAW IN INDONESIA**

ABSTRACT

The practice of binary options has become viral because it offers convenience in making profits and is supported by the conditions of Covid 19. Not only that, the emergence of affiliates like Indra Kenz and Doni Salmanan has increasingly attracted people to fall into this fraudulent investment. Reflecting on the indictment filed by the Public Prosecutor, law enforcement still uses Law Number 1 of 1946 (KUHP) and Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Transaction Information (ETI Law), even though Indonesia's positive law has Law Number 10 of 2011 concerning Commodity Futures Trading (CFT Law). The purpose of this study is to find out the urgency of formulating policies regarding binary option practices and formulating ideal arrangements into positive law in Indonesia. This study uses a normative juridical method based on existing laws and regulations. Furthermore, the research results which reveal that binary option law enforcement through policy formulation needs to be carried out considering the condition of legal needs in society and law enforcement through the ETI Law are considered inappropriate. Because binary options imitate derivative contracts and are similar or imitate the way options work, in other words, it is a deviation from the CFT Law. In addition, criminalization is possible by analyzing the criteria or conditions put forward by the expert. Then, it is possible to formulate binary options in terms of the formulation of criminal acts in Indonesian positive law, specifically namely the address, the formulation of the prohibition of acts, and the criminal sanctions. The author also recommends an article to state the ideal arrangement in part d of Article 57 of the CFT Law. Then, the author continues to follow the existing criminal provisions, namely Article 72 of the CFT Law. Thus, policy formulation is possible if viewed from the urgency and the formulation of criminal provisions has been poured into a special law. Therefore, binary option law enforcement has a good legal basis.

Keywords: Law Enforcement, Binary Option, Formulation Policy.